

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, aparat desa sebagai aktor dari pengelolaan dana desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara dan tata kelola keuangan. Tata cara dan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip *good governance*.

*Good Governance* merupakan sistem yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintah melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasar pada kerangka peraturan. Konsep *good governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan keuangan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan keuangan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dkk, 2007).

Dalam penerapannya, *Good Governance* memiliki enam prinsip yang harus dilaksanakandalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa

dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu *transparency* (keterbukaan informasi yang relevan), *accountability* (pertanggungjawaban kinerja), *participation* (keterlibatan masyarakat), *responsibility* (tanggung jawab masyarakat, lingkungan dan pemerintah), *independency* (tidak ada saling mendominasi dan intervensi), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Dalam UU desa dan peraturan terkait lainnya sudah ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin (Soleh, et al., 2016). Prinsip pengelolaan yang baik harus memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keterbukaan, keadilan dan kemandirian (Sari, 2013). Sedangkan sebagai praktik pelayanan publik yang baik harus memuat prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Rahadian, 2008). Selanjutnya persyaratan minimal untuk mencapai *good governance* dalam mengelola keuangan daerah adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektifitas, efisien, dan keadilan (Pazri, 2016).

Dalam mengelola dana desa, selain prinsip-prinsip *good governance* dan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang utama dalam penentu kinerja, pengawasan terhadap kinerja perangkat desa juga memperkuat keberhasilan pengelolaan dana desa. Ada tidaknya pengawasan dalam hal ini sistem pengendalian internal juga akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa dalam mengelola dana desa (Tarjono dan Nugraha, 2015). Dengan adanya sistem pengendalian internal prinsip-prinsip *good governance* dapat dijalankan dengan baik.

Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menghasilkan pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No.37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak yang berkepentingan (Mahmudi. 2015: 9). Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan.

Fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten Alor khususnya kecamatan Pantar masalah yang selalu menjadi sorotan oleh masyarakat adalah pelaksanaan anggaran desa kepala desa cenderung memakai pihak ketiga sehingga masih ada *mark up* anggaran, kurang efektifnya realisasi penggunaan dana desa

sehingga seringkali bergeser dalam tahapan realisasi. Berbagai kendala lain seperti masih banyaknya pelaksanaan dana desa yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku, ketidakdisiplinan para pegawai, serta adanya keterlibatan pendamping desa dalam pelaksanaan dana desa sehingga belum atau tidak maksimalnya output dari kinerja tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh good governance terhadap efektivitas sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada variabel dependen yaitu efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemai Kabupaten Bandung. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerry an (2015) menyatakan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Supamo (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Siswandi (2013), diperoleh hasil penelitian bahwa partisipasi, berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi anggaran terhadap efektifitas anggaran merupakan penelitian yang masih dalam perdebatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati (2015) Pengaruh partisipasi anggaran secara parsial terhadap efektifitas anggaran SKPD tergolong lemah dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,006.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta adanya ketidakseragaman hasil penelitian, maka peneliti ingin melakukan

penelitian untuk menguji pengaruh *Good governance* terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dalam mengelola dana desa. Pemerintah yang menyampaikan atau mempublikasikan laporan keuangan desa secara tepat waktu biasanya memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat tercipta ketika adanya kerja sama dan kepercayaan satu sama lain. Namun hal ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, sehingga manajemen tidak semena-mena dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan desa (Mirtafianti, 2016).

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa di berbagai daerah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Good Governance* Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Mengelola Dana Desa di Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah ?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance* terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur akuntansi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang membahas mengenai *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### 2. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini, sangat diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi pemerintah desa di Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur mengenai *good governance* terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dalam mengelola dana desa.